

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, TINGKAT
KEMANDIRIAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA DI PULAU SUMATERA**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh:

SALSA AMANAH VINTHA RIHAN

062140512628

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, TINGKAT
KEMANDIRIAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA DI PULAU SUMATERA**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh:

SALSA AMANAH VINTHA RIHAN

062140512628

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>. Pos El : info@polsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NPM : 062140512628
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana tersebut di atas beserta isinya merupakan hasil penulisan saya sendiri.
2. Skripsi tersebut bukan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari dinyatakan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain, maka saya bersedia menanggung konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan,



Salsa Amanah Vintha Rihan

062140512628



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NPM : 062140512628
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik
Mata Kuliah : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Telah diujikan pada Ujian Skripsi Tanggal 18 Juli 2025
Dihadapan Tim Penguji Jurusan Akuntansi
Prodi Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang,

2025

Menyetujui,
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197804102005012020


Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc
NIP. 199102022020121009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197104121998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: info@polsri.ac.id

PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI

Mahasiswa berikut:

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D-IV Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Telah melaksanakan revisi terhadap Skripsi yang diujikan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Pelaksanaan revisi terhadap Skripsi tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi:

No	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Pembahasan pada hasil uji regresi data panel	Bainil Yulina, S.E., M.Si NIP. 196107011989032001	25/07/2025	
2	Teknik penulisan	Rosy Armaini, S.E., M.Si, Ak NIP. 197108242006042001	29/07/2025	
3	-	Yuliana Sari, S.E., MBA, Ak NIP.197707292008012015	1/8-25	
4	Tambahkan perhitungan nilai untuk kesimpulan	Riza Wahyudi, S.E, M.M, Ak NIP. 197007182001121001	22/07/2025	
5	-	Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc NIP. 199102022020121009	22/07/2025	

Palembang, 25 Juli 2025

Ketua Penguji

Bainil Yulina, S.E., M.Si
NIP 196107011989032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*-nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doa di setiap langkah.
- Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat serta doa disetiap saat.
- Sahabat-sahabat, orang terdekat, dan orang-orang yang selalu memberi dukungan.
- Kedua Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.
- Teman-teman seperjuangan dari kelas 8 APC.
- Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang sangat berjasa karena sudah mendidik serta membimbing selama perkuliahan.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera”**. Sejalan dengan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Ibu Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, terima kasih atas ilmu dan didikan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh staf administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
8. Keluarga tercinta, Ayahanda, Ibunda, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat serta do'a untuk keberhasilan penulis.
9. Teman-teman kelas 8 APC Jurusan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya, yang selalu membantu dan menyemangati.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum tersusun dengan sempurna, karena masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca. Apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.

Palembang, 2025

Penulis

ABSTRACT

The Influence of Capital Expenditure, Balancing Funds, Fiscal Independence, and Fiscal Dependence on the Financial Performance of City Governments in Sumatera Island

State Polytechnic of Sriwijaya, Accounting Department

Salsa Amanah Vintha Rihan, 2025 (xvi + 76 Pages)

Email: salsavintha123@gmail.com

This study aims to analyze the influence of capital expenditure, balancing funds, fiscal independence, and fiscal dependence on the financial performance of city governments in Sumatra Island during 2019–2023. Financial performance is measured using the effectiveness ratio, indicating the extent to which regional revenue realization meets predetermined targets. A quantitative approach with panel data is employed, analyzed using multiple linear regression based on data from Regional Government Financial Statements, particularly the Budget Realization Report issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. The results show that partially, capital expenditure and balancing funds do not significantly affect financial performance. In contrast, fiscal independence and fiscal dependence have a significant negative effect. Simultaneously, the four variables significantly influence financial performance. These findings indicate that increased capital spending and transfer funds do not automatically improve financial performance, especially without enhanced fiscal independence and reduced reliance on central government transfers.

Keywords: *Capital Expenditure, Balance Fund, Fiscal Independence, Fiscal Dependency, Financial Performance.*

ABSTRAK

Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurusan Akuntansi

Salsa Amanah Vintha Rihan, 2025 (xvi + 76 Halaman)

Email: salsavintha123@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio efektivitas, yang menunjukkan sejauh mana realisasi pendapatan daerah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif dengan data panel digunakan, dianalisis menggunakan regresi linier data panel berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, tingkat kemandirian dan ketergantungan berpengaruh negatif secara signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal dan dana transfer tidak serta-merta meningkatkan kinerja keuangan, terutama tanpa peningkatan kemandirian dan pengurangan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, Tingkat Ketergantungan, Kinerja Keuangan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL MUKA	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Tujuan Penelitian	14
1.4.2 Manfaat Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Keagenan	16
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3 Belanja Modal	18
2.1.4 Dana Perimbangan	19
2.1.5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	19
2.1.6 Tingkat Ketergantungan pada Dana Transfer	20
2.2 Peneliti Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24

2.4 Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
2.4.3 Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.4.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.4.5 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Variabel Penelitian	30
3.3.1 Variabel Dependen.....	30
3.3.2 Variabel Independen	30
3.3.3 Operasional Variabel.....	31
3.4 Populasi dan Sampel.....	33
3.4.1 Populasi.....	33
3.4.2 Sampel.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2 Uji Pemilihan Model	36
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.4 Analisis Model Terpilih	39
3.6.5 Uji Hipotesis	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Statistik Deskriptif	42
4.1.2 Analisis Pemilihan Model.....	50
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	52

4.1.4 Analisis Model Terpilih	54
4.1.5 Uji Hipotesis	56
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan.....	59
4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.	61
4.2.3 Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan	63
4.2.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan	65
4.2.5 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Secara Simultan	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian.....	70
5.2.1 Saran	69
5.2.2 Keterbatasan Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Kemandirian di Kota Pulau Sumatera Tahun 2023	9
Tabel 1.2	Persentase Tingkat Ketergantungan Terendah terhadap Dana Perimbangan di Kota Pulau Sumatera Tahun 2019-2023	10
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.3	Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	21
Tabel 2.4	Peneliti Terdahulu	21
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	33
Tabel 3.2	Populasi Kota di Pulau Sumatera.....	34
Tabel 4.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.2	Hasil Uji <i>Chow</i>	50
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Hausman</i>	51
Tabel 4.4	Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	51
Tabel 4.5	Hasil Uji Pemilihan Model	52
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	55
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 4.11	Hasil Uji F	57
Tabel 4.12	Hasil Uji T.....	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Diagram Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera Tahun 2023	3
Gambar 1.2	Diagram Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	5
Gambar 1.3	Diagram Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kota di Pulau Sumatera Tahun 2023	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1	Tren Belanja Modal per Kota Selama 5 Tahun.....	42
Gambar 4.2	Tren Belanja Modal per Tahun	43
Gambar 4.3	Tren Dana Perimbangan per Kota Selama 5 Tahun	44
Gambar 4.4	Tren Dana Perimbangan per Tahun	44
Gambar 4.5	Tren Tingkat Kemandirian per Kota Selama 5 Tahun	45
Gambar 4.6	Tren Tingkat Kemandirian per Tahun.....	45
Gambar 4.7	Tren Tingkat Ketergantungan per Kota Selama 5 Tahun	46
Gambar 4.8	Tren Tingkat Ketergantungan per Tahun.....	46
Gambar 4.9	Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Efektivitas per Kota Selama 5 Tahun	47
Gambar 4.10	Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Efektivitas per Tahun.....	47
Gambar 4.11	Hasil Uji Normalitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 2 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 5 : Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 6 : Hasil Uji *Chow*
- Lampiran 7 : Hasil Uji *Hausman*
- Lampiran 8 : Hasil Uji *Lagrange Multiplier*
- Lampiran 9 : Hasil Analisis Model Terpilih
- Lampiran 10 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 11 : Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 12 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 13 : Hasil Uji Autokolerasi
- Lampiran 14 : Hasil Uji Determinasi R^2
- Lampiran 15 : Hasil Uji F
- Lampiran 16 : Hasil Uji T
- Lampiran 17 : Surat Izin Pengambilan Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik serta merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dengan 17.508 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025). Populasi di Indonesia telah melebihi 281 juta jiwa, yang terbagi menjadi 38 provinsi dan berbagai kabupaten dan kota di dalamnya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat dinamis, dengan tantangan dalam pengelolaan wilayah yang luas dan beragam, baik dalam aspek sumber daya alam maupun pembangunan daerah.

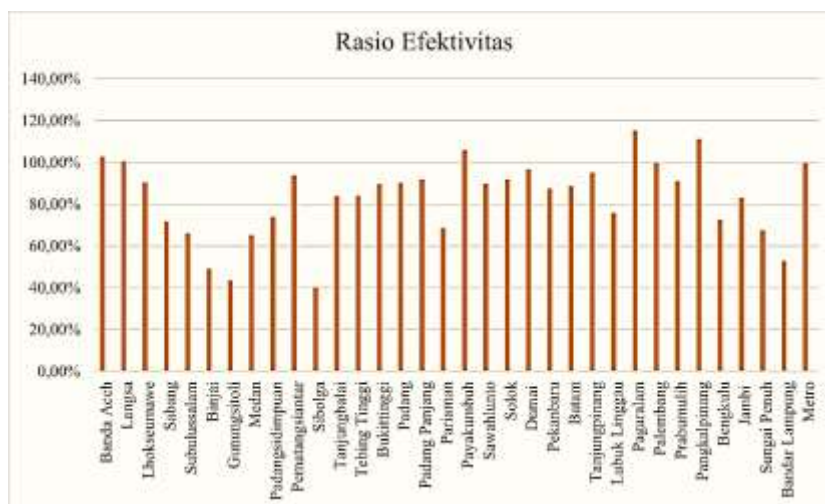
Keberhasilan dalam pengelolaan wilayah yang besar dan beragam ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih luas dalam menyusun kebijakan dan mengelola anggaran. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Seiring dengan diberikannya kewenangan otonomi, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pulau Sumatera mencerminkan kompleksitas tersebut dengan karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor industri seperti di Kota Medan hingga sektor perkebunan di Riau dan Jambi. Kondisi ini mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara berbeda-beda.

Sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera menjadi wilayah penting untuk dianalisis, terutama dalam hal efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketimpangan penerimaan PAD antarprovinsi menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan efektivitas anggaran, yang mencerminkan perlunya strategi untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Pemerintah kota umumnya memiliki struktur ekonomi dan pelayanan publik yang lebih kompleks dibandingkan kabupaten, serta PAD yang lebih stabil. Kota-kota di Sumatera juga menunjukkan variasi fiskal yang menarik seperti Medan, Batam, dan Palembang yang relatif mandiri, sementara beberapa kota lain di Aceh dan Sumatera Barat masih sangat bergantung pada pusat. Hal ini menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis lebih dalam guna melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangannya berjalan.

Guna memahami lebih jauh tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, perlu dilihat bagaimana kinerja keuangan daerah itu sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya bergantung pada kinerja keuangan daerah, yang mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan cara yang efisien dan efektif (Arusani dkk., 2022). Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai kondisi keuangan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Khair, 2020). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah di antaranya adalah belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan .

Sebagai ilustrasi awal terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya dalam hal efektivitas pendapatan, grafik berikut menyajikan rasio efektivitas dari sejumlah pemerintah kota di Pulau Sumatera. Rasio efektivitas mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 1.1
Diagram Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera Tahun 2023

Berdasarkan grafik tersebut, terdapat kota-kota yang menunjukkan kinerja sangat baik dalam hal efektivitas pendapatan, seperti Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Payakumbuh, Kota Pagaralam, dan Kota Pangkalpinang, yang semuanya memiliki rasio efektivitas di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal dan kemampuan pengelolaan keuangan yang relatif kuat, disisi lain masih terdapat beberapa kota yang belum menunjukkan efektivitas yang optimal, seperti Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, dan Kota Bandar Lampung yang memiliki rasio efektivitas di bawah 60%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan fiskal, kurangnya sumber PAD, atau kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Perbedaan rasio efektivitas yang cukup mencolok antar daerah ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hal tersebut mendorong perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah fokus menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, salah satunya melalui Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Efisiensi anggaran tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya penghematan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan waktu pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan efisiensi anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, dan memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dicapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan kebijakan ini dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah. Efektivitas dalam konteks pemerintahan daerah dapat dilihat dari pencapaian program kerja, peningkatan pelayanan publik, keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah atau kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, tanpa pemborosan dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dengan demikian, pengukuran efektivitas menjadi penting untuk mengetahui apakah penghematan anggaran yang dilakukan benar-benar berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan pelayanan publik.

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Lathifa & Haryanto, 2019; Mahendra & Barus, 2023), sementara dana perimbangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah (Juwita & Hasbi, 2025; Putri & Darmayanti, 2019). Selain itu, ketergantungan terhadap dana perimbangan yang tinggi menjadi tantangan bagi banyak daerah dalam mencapai kemandirian fiskal, ketergantungan terhadap dana pusat dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah (Juwita & Hasbi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih optimal guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer transfer, serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, meskipun ketergantungan pada dana perimbangan menjadi masalah, belanja modal tetap menjadi faktor yang sangat

penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja keuangan daerah. Belanja modal memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahendra & Barus, 2023). Meskipun belanja modal yang besar diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, kenyataannya masih terdapat kendala di beberapa wilayah, termasuk kota-kota di Pulau Sumatera. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran yang besar tidak selalu dibarengi dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif, sehingga efektivitas penggunaan dana masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, mengukur kinerja keuangan melalui dimensi efektivitas menjadi sangat relevan, karena efektivitas mencerminkan sejauh mana output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan anggaran. Ketika belanja modal mampu direalisasikan secara efektif, maka dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal akan semakin nyata, yang akan tercermin dalam kinerja keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan gambar 1.2, alokasi anggaran belanja di salah satu provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara pada tahun 2023, menunjukkan bahwa 67,7% digunakan untuk belanja operasi, 19,0% untuk belanja modal, 12,8% untuk belanja transfer, dan 0,5% untuk belanja tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi masih menjadi bagian terbesar dari pengeluaran di Sumatera Utara pada tahun tersebut (PRP2Sumut, 2023).



Sumber: Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.2
Diagram Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Berdasarkan gambar di bawah, alokasi anggaran belanja di salah satu provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara pada tahun 2023, menunjukkan bahwa 67,7% digunakan untuk belanja operasi, 19,0% untuk belanja modal, 12,8% untuk belanja transfer, dan 0,5% untuk belanja tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasi masih menjadi bagian terbesar dari pengeluaran di Sumatera Utara pada tahun tersebut (PRP2Sumut, 2023).

Besarnya belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah fokus pada layanan publik sehari-hari, seperti membayar gaji pegawai, membeli barang dan jasa, serta menutupi biaya operasional lainnya. Namun, belanja modal yang hanya 19,0% menunjukkan bahwa dana untuk pembangunan fisik, seperti infrastruktur dan investasi jangka panjang, masih cukup kecil. Padahal, pembangunan tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. belanja transfer yang sebesar 12,8% digunakan untuk mendukung keuangan pemerintah kota dan kabupaten dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, belanja tak terduga hanya 0,5%, yang berarti sangat sedikit anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak atau kejadian tidak terduga.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 1.3 Diagram Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Kota di Pulau Sumatera Tahun 2023

Berdasarkan diagram tersebut, pada tahun 2023 hanya 1 dari 34 kota di Pulau Sumatera yang mengalokasikan belanja modal lebih dari 30%, yaitu Kota Pagaralam mencatatkan penggunaan belanja modal sebesar 33,40%. Di tahun 2023,

jumlah kota yang mengalokasikan belanja modal di atas 30% merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan periode 2021-2023.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak daerah adalah ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah agar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Namun, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan masih tinggi, yang berpotensi menghambat upaya untuk mencapai kemandirian keuangan daerah (Maggara dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, termasuk peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan (Maggara dkk., 2024). Ketergantungan ini menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Terkait konteks pengukuran kinerja keuangan melalui efektivitas, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menunjukkan lemahnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ketika sebagian besar belanja daerah bersumber dari transfer pusat, fleksibilitas dan efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pencapaian target-target pembangunan. Oleh karena itu, mengkaji pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan sangat penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan dana yang tersedia secara efektif demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian ini tercermin dalam seberapa besar PAD yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi umumnya lebih mandiri dan dapat mengatur anggaran serta kebijakan fiskal dengan lebih fleksibel, karena mereka tidak terlalu bergantung pada alokasi

dana dari pusat (Mahmudi, 2016). Namun, meskipun ada daerah di Sumatera yang memiliki PAD cukup besar, banyak yang masih kesulitan untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang ideal. Sebagai contoh, meskipun Provinsi Aceh memiliki PAD yang cukup tinggi, tingkat kemandirian keuangan daerahnya tetap tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD cukup besar, pengelolaan keuangan yang kurang optimal masih menjadi kendala dalam mencapai kemandirian yang lebih baik (Faisal dkk.,2023). Sementara itu, Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah, dari 21,11% pada 2022 menjadi 25,18% pada 2024 (BPKP, 2024). Peningkatan ini menggambarkan bahwa meskipun PAD meningkat, masih dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik agar kemandirian keuangan dapat tercapai secara maksimal.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena perannya yang sangat penting dalam menentukan seberapa besar kemampuan daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Variabel ini menggambarkan seberapa jauh suatu daerah mampu mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan lebih memfokuskan diri pada peningkatan pendapatan yang dihasilkan sendiri atau PAD. Kemandirian keuangan ini berperan penting dalam memungkinkan daerah untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Walaupun tingkat kemandirian keuangan memengaruhi kinerja keuangan, variabel ini lebih tepat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri daripada sebagai indikator yang mengukur hasil pengelolaan tersebut. Terkait hal ini, indikator kinerja lebih berfokus pada hasil akhir, seperti seberapa efektif belanja daerah dilakukan atau seberapa efisien anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah lebih tepat dipilih sebagai variabel yang mengukur kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, bukan sebagai indikator kinerja yang lebih spesifik mengukur output atau hasil langsung dari pengelolaan keuangan tersebut. Penggunaan variabel ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa besar kemampuan daerah untuk mengelola

keuangan secara independen, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efektivitas dan hasil dari kebijakan yang diterapkan.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kemandirian di Kota Pulau Sumatera Tahun 2023

Kota	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
Batam	1.529.020.059.422	1.266.725.077.569	9.167.670.820	119,84	Sangat Baik
Medan	2.442.782.479.668	2.482.957.621.792	98.840.124.289	94,62	Sangat Baik
Palembang	1.442.610.534.334	1.943.859.241.336	306.252.797.960	64,11	Sangat Baik
Pekanbaru	890.286.830.690	1.500.212.950.743	-	59,34	Sangat Baik
Dumai	566.903.618.474	1.129.829.347.791	-	50,18	Sangat Baik
Solok	45.787.523.863	458.550.470.056	918.000.000	9,97	Sangat Kurang
Pariaman	38.861.600.702	505.788.526.492	6.163.724.240	7,59	Sangat Kurang
Gunungsitoli	27.398.988.049	578.847.677.538	10.817.683.936	4,65	Sangat Kurang

Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Selama periode 2023, tingkat kemandirian daerah yang sangat baik tercatat di lima kota, yaitu Batam dengan rasio tertinggi sebesar (119,84%), disusul oleh Medan (94,62%), Palembang (64,11%), Pekanbaru (59,34%), dan Dumai (50,18%). Tingginya rasio ini mencerminkan kemampuan daerah-daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, tiga kota lainnya menunjukkan tingkat kemandirian yang sangat rendah, yakni Solok (9,97%), Pariaman (7,59%), dan Gunungsitoli yang memiliki rasio paling rendah sebesar (4,65%). Rendahnya tingkat kemandirian ini menjadi indikator kuat bahwa ketiga daerah tersebut masih sangat bergantung pada dana perimbangan dan belum optimal dalam menggali potensi PAD-nya.

Di sisi lain pada periode 2019-2023, tingkat ketergantungan dengan dana perimbangan yang berada di bawah 50% tercatat di Kota Medan, Batam, dan Palembang. Namun, tahun 2020, Kota Palembang mengalami peningkatan tingkat ketergantungan hingga melebihi 50%, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 49,27% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selain ketiga kota tersebut,

tingkat ketergantungan di daerah lainnya tergolong sangat tinggi. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Ketergantungan Terhadap Dana Perimbangan di Kota Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Tahun	Daerah	Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2019	Palembang	1.968.123.627.878,00	3.987.546.941.588,54	49,36	Tinggi
2020	Medan	2.056.223.073.978,00	4.121.585.751.572,01	49,89	Tinggi
	Batam	1.058.103.342.486,00	2.577.504.994.815,32	41,05	Tinggi
2021	Medan	2.059.980.280.796,00	5.023.080.346.608,29	41,01	Tinggi
	Batam	1.032.052.817.732,00	2.527.649.538.975,96	40,83	Tinggi
	Palembang	1.818.632.088.018,00	3.690.804.007.361,99	49,27	Tinggi
2022	Batam	1.260.420.763.479,00	2.848.972.905.176,25	44,24	Tinggi
	Palembang	738.854.069.678,00	4.067.459.091.233,19	42,75	Tinggi
2023	Medan	2.482.957.621.792,00	5.802.580.478.749,50	42,79	Tinggi
	Batam	1.266.725.077.569,00	3.103.208.245.106,79	40,82	Tinggi
	Palembang	1.943.859.241.336,00	4.194.409.370.231,02	46,34	Tinggi

Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Namun, meskipun beberapa daerah mengalami penurunan ketergantungan, faktor lain yang sangat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada pengurangan ketergantungan terhadap dana perimbangan, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan potensi PAD sebagai sumber utama pendanaan daerah.

Sebaliknya, berdasarkan tingkat ketergantungan, banyak daerah yang masuk dalam kategori sangat tinggi, yang artinya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Saragih & Nurlinda, 2023). Ketergantungan ini sering memicu fenomena *flypaper effect*, yaitu ketika dana dari pusat lebih banyak digunakan untuk belanja operasional seperti gaji dan biaya rutin, daripada untuk belanja pembangunan. Akibatnya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan

untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas. Tingkat ketergantungan yang terlalu tinggi juga bisa melemahkan semangat daerah untuk menggali potensi lokal dan menciptakan sumber pendapatan sendiri (Putri dkk., 2024). Apabila daerah terus bergantung pada dana pusat, maka mereka akan kesulitan merancang kebijakan keuangan yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan kualitas layanan publik, karena dana yang ada lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka pendek daripada untuk hal-hal yang memberi manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Penelitian ini menetapkan tingkat ketergantungan sebagai variabel independen karena menunjukkan kondisi awal keuangan daerah yang bisa memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan. Variabel ini bukan indikator kinerja, karena indikator kinerja digunakan untuk menilai hasil akhir atau efektivitas penggunaan anggaran. Sementara itu, ketergantungan lebih tepat dilihat sebagai salah satu penyebab atau faktor yang memengaruhi bagaimana daerah bisa mengelola anggarannya dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tingkat ketergantungan sangat penting diuji untuk mengetahui apakah ketergantungan yang tinggi benar-benar berdampak pada rendahnya kinerja keuangan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pernah diteliti oleh (Desky dkk., 2023; Lathifa & Haryanto, 2019; Putri & Priyadi, 2021), pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pernah diteliti oleh (Mahendra & Barus, 2023; Putri & Priyadi, 2021; Rahayu dkk., 2023), pengaruh tingkat kemandirian terhadap kinerja keuangan (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023; Hakiki dkk., 2023), dan pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pernah diteliti oleh (Sedek & Kusumawati, 2024; Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023) yang berarti penelitian mengenai pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan telah banyak dilakukan secara parsial sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada tingkat provinsi (Mahendra & Barus, 2023; Ramadhan dkk., 2022) ataupun kabupaten (Akib dkk., 2024; Saragih dkk., 2023), sementara kajian yang

secara khusus meneliti pemerintah kota di Pulau Sumatera masih terbatas. Padahal, pemerintah kota memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten, sehingga diperlukan analisis yang lebih spesifik untuk memahami dinamika keuangan daerah di tingkat kota. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya hanya menganalisis hubungan satu atau dua variabel secara terpisah, seperti belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah atau dana perimbangan terhadap ketergantungan fiskal, tanpa melihat bagaimana keempat variabel tersebut berinteraksi secara simultan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menyatakan bahwa dana perimbangan berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, sementara penelitian lain menemukan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi justru menghambat kemandirian keuangan daerah dan menyebabkan fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan transfer dari pusat dibandingkan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, efektivitas belanja modal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah juga masih menjadi perdebatan. Meskipun belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang tinggi tidak selalu berdampak positif terhadap kinerja keuangan, terutama jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efisien.

Perbedaan lain dalam penelitian ini terletak pada metode pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan rasio efisiensi (Monalisa & Indriasari, 2022; Ratnasari & Meirini, 2022) dan rasio pertumbuhan (Aulia & Rahmawaty, 2020; Lathifa & Haryanto, 2019; N. K. Putri & Darmayanti, 2019) sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Namun, penelitian ini menggunakan rasio efektivitas untuk menilai kinerja keuangan, karena rasio ini lebih mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung

belanja yang telah direncanakan. Rasio efektivitas memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana realisasi pendapatan daerah mampu memenuhi target yang ditetapkan, sehingga lebih relevan dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera.

Penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis secara simultan pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel selama periode 2019–2023 untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai tren perubahan keuangan daerah dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pemerintah kota di Pulau Sumatera dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan efektivitas belanja modal guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena ketimpangan fiskal khususnya di Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang menghadapi masalah dalam mencapai kemandirian keuangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan menyebabkan alokasi anggaran yang kurang efektif, sering kali lebih berfokus pada belanja rutin dibandingkan pembangunan. Selain itu, fenomena *flypaper effect* semakin memperparah ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, lemahnya perencanaan dan pengawasan masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini memberikan dorongan peneliti untuk mengangkat judul **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan memberikan kemudahan dalam menganalisis serta mengolah data, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada rasio efektivitas sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pada pemerintah Kota di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Pulau Sumatera.
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Pulau Sumatera.
3. Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Pulau Sumatera.

4. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Pulau Sumatera.
5. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Pulau Sumatera. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan akademik dan praktis, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman, terutama dalam bidang keuangan sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengalaman akademik yang berharga dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan dapat memberikan manfaat, khususnya di Jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri Sriwijaya dan Perguruan tinggi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak di mana satu atau lebih pihak (prinsipal) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (M. Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dalam sektor publik menjelaskan bahwa pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran cenderung bersifat memanfaatkan semaksimal mungkin utilitasnya dengan mengalokasikan sumber daya didalam anggaran (Adhana, 2019). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran serta sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori ini menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pihak daerah sebagai agen untuk bertindak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat yang bertindak sebagai prinsipal. Pihak daerah masih bergantung pada bantuan dana perimbangan tersebut yang diberikan oleh pusat, hal ini yang menjadi hambatan untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dasar bagi teori ini. Artinya, dalam konteks kemandirian keuangan daerah, pemerintah pusat mengharapkan bahwa setiap daerah untuk mampu mengelola sumber daya keuangan masing-masing secara efektif dan efisien (Sulistyawati dkk., 2024).

Konflik keagenan dalam pemerintahan sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti rendahnya kemandirian fiskal, tingginya ketergantungan pada dana transfer, tidak proporsionalnya belanja modal, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena situasi ini, tujuan utama dari desentralisasi fiskal yaitu untuk mendorong kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana

pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai agen yang bertanggung jawab, serta mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Teori ini juga membantu menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang memadai dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi dan desentralisasi fiskal.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Keuangan daerah mencakup hak dan kewajiban keuangan pemerintah daerah, termasuk aset dan sumber daya untuk penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Kinerja keuangan daerah diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, kemandirian fiskal, serta kemampuan daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan pelayanan publik (Mahmudi, 2016). Kinerja keuangan daerah dinilai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, tercermin dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (BPKAD, 2023).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan program dan kebijakan. Apabila pemerintah daerah mengimplementasikan program dengan benar, maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Memberikan hasil keuangan yang berkualitas bagi masyarakat merupakan pencapaian yang dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera (Rahmalita, 2023). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ada lima rasio yang dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2016). Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kriteria efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Dewata dkk

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan). Belanja modal diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah: Digunakan untuk pengadaan, balik nama atau pembuatan sertifikat tanah yang bersifat administrative.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin guna mendukung operasional pemerintahan.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Digunakan untuk pembangunan atau renovasi gedung pemerintahan maupun fasilitas publik.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi guna meningkatkan konektivitas dan produktivitas daerah.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Digunakan untuk pengadaan aset lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas tetapi masih berkontribusi terhadap pelayanan publik.
- f. Belanja Modal BLU : Pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian aset dalam penyelenggaraan operasional BLU (Halim, 2013).

Terkait kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal memiliki keterkaitan yang erat. Pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja modal dengan baik dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Namun, jika pengelolaan belanja modal tidak efisien, maka anggaran yang tersedia dapat terbuang sia-sia tanpa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal benar-

benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal (Halim, 2013). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal (Nurkhayat dkk.,2018). Dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (Halim,2013).

Keberhasilan kinerja pemerintah daerah seringkali diukur dengan besarnya dana perimbangan yang diterima. Semakin besar alokasi dana perimbangan yang disalurkan ke daerah, semakin baik dianggap kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur. Namun, meskipun tambahan dana perimbangan dapat mendukung program-program daerah, hal ini juga berpotensi menurunkan rasio kemandirian fiskal. Ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan menurunnya tingkat kemandirian daerah, yang mencerminkan terbatasnya kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan penggunaan dana perimbangan secara efisien dan transparan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat (Yudiasuti dkk.,2025).

2.1.5 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan dan pengeluarannya tanpa ketergantungan yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan lokal untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin mandiri

suatu daerah dalam mengelola keuangan dan kebijakan fiskalnya (Sakir dkk., 2023). Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari rendahnya ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Semakin mandiri suatu daerah, semakin kecil ketergantungannya pada sumber pendanaan dari luar, dan sebaliknya. Berikut adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Dewata dkk

2.1.6 Tingkat Ketergantungan pada Dana Transfer

Tingkat ketergantungan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah atau entitas bergantung pada sumber daya eksternal, seperti transfer dana dari pemerintah pusat, dalam membiayai pengeluarannya. Tingkat ketergantungan fiskal mengacu pada sejauh mana suatu daerah bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah terhadap dana perimbangan, semakin rendah tingkat kemandiriannya dalam mengelola keuangan daerah (Aysiah, 2022). Tingkat ketergantungan fiskal adalah rasio besarnya jumlah penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat terhadap penerimaan asli daerah (PAD). Tingkat ketergantungan fiskal ini merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah, semakin kecil tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah maka semakin baik daerah tersebut (Ariansyah dkk., 2014). Berikut adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat ketergantungan keuangan daerah:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Dewata dkk

2.2 Peneliti Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai kinerja keuangan daerah. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu:

Tabel 2.4
Peneliti Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Anggi Juwita, Khairita Hasbi (2025)	Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022	X1 : Belanja Modal X2 : Dana Perimbangan X3 : Pendapatan Asli Daerah Y : Kinerja Keuangan	- Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
2.	Novi Natalia, Wendi Suprpto (2024)	Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal Dan <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Kinerja Keuangan	X1 : Dana Perimbangan X2 : Belanja Modal X3 : <i>Fiscal Stress</i>	- Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Y : Kinerja Keuangan	- Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. - <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
3.	Resa Novita, Fefri Indra Arza (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Pulau Sumatera Tahun 2021	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan	- Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Dana perimbangan dalam belanja modal mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Sefhvira Chilly Bella Tiara Sedek, Eny Kusmawati (2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : <i>Leverage</i> X2 : Tingkat Kekayaan X3 : Tingkat Ketergantungan X4 : Temuan Audit BPK X5 : Pendapatan Pajak Daerah Y : Kinerja Keuangan	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.	Doni Hakiki, Tumija, Ika	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Belanja Daerah	- Rasio kemandirian tinggi membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan.

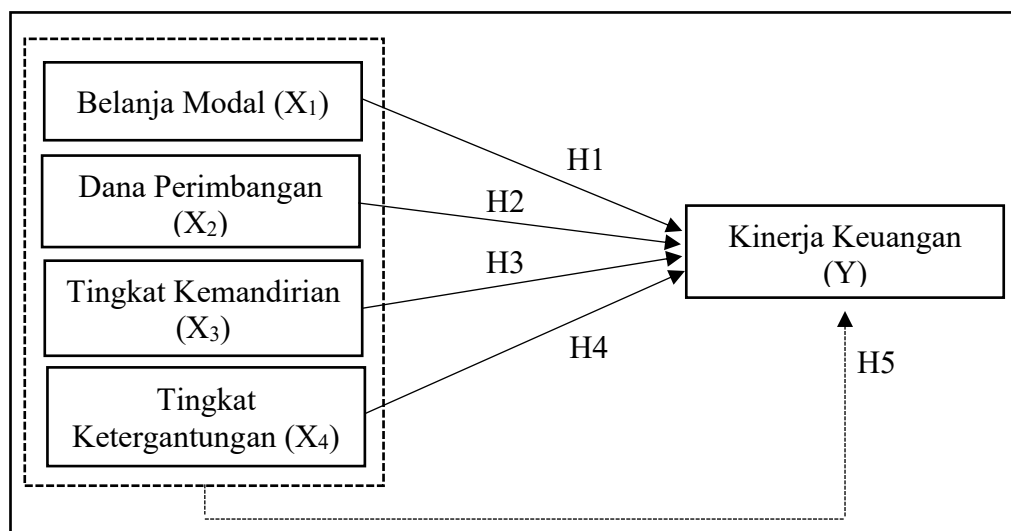
No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Agustina (2023)	Terhadap Kinerja Keuangan	Y : Kinerja Keuangan	- Belanja daerahnya yang tinggi, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerahnya menjadi rendah.
6.	Rauhul Ijtihad, Iwan Harspono (2023)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Efektivitas PAD X3 : Pengelolaan Belanja Daerah Y : Kinerja Keuangan	- Rasio kemandirian daerah tidak berdampak positif pada kinerja keuangan daerah; dalam hal ini. - Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. - Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
7.	Dwi Ratna Sari, Dianita Meirini (2022)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Silpa Y : Kinerja Keuangan	- Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. - Kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA. - Kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan pada belanja modal. - Kinerja keuangan juga dapat dipengaruhi secara simultan oleh PAD, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA.
8.	Indriani Nuzul Fauziyah, Diah Ekaningtias (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja	X1 : Pertumbuhan Belanja X2 : PAD X3 : Ukuran Legislatif X4 : Dana Perimbangan Y : Kinerja Keuangan	- Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh pada efektivitas, tetapi berpengaruh pada efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. - Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh pada efektivitas maupun efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Keuangan Pemerintah Daerah		- Ukuran Legislatif tidak berpengaruh pada efektivitas maupun efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. - Dana Perimbangan berpengaruh pada efektivitas, tetapi tidak berpengaruh pada efisiensi
9.	Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan, Fitriana (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Belanja Daerah X3: Kemandirian Keuangan Y : Kinerja Keuangan	- Pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. - Pengelolaan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. - Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah.
10.	Alfia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Ukuran Pemerintah Y : Kinerja Keuangan	- Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - Belanja Modal Berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka terbentuklah sebuah kerangka berfikir pada penelitian ini. Kerangka penelitian menjelaskan atau

menggambarkan bagaimana hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini meliputi, belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu, kinerja keuangan pemerintah daerah.



Sumber: Data diolah peneliti , 2025

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2013). Produktivitas penggunaan anggaran tercermin dari pengalokasian belanja modal. Semakin maksimal penggunaan belanja modal berarti semakin bertambahnya aset tetap dan sarana prasarana suatu daerah yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Apabila pengalokasian belanja modal dilakukan dengan tepat yang berdampak pada perkembangan infrastruktur maka hal tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak pada pembangunan daerah yang dapat menunjang terjadinya peningkatan kinerja keuangan pemerintah (Salsabila, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal secara strategis menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik. Beberapa

peneliti terdahulu menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Juwita & Hasbi, 2022; Maulina dkk., 2021; Lathifa & Haryanto, 2019; Leki dkk., 2018; Sari & Mustanda, 2019). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Atmoko & Khairudin, 2022; Novita & Arza, 2024; S. T. Putri & Priyadi, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2013). Dana ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang dialokasikan oleh pemerintah pusat guna membantu pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh bagaimana dana perimbangan digunakan. Penggunaan dana perimbangan yang optimal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran mengoptimalkan layanan publik dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Mulia & Widiatmoko, 2025). Penggunaan dana perimbangan yang efisien dapat meningkatkan PAD melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung perekonomian daerah. Namun, jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik atau terlalu bergantung pada dana transfer tanpa usaha untuk meningkatkan PAD, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang berdampak buruk pada keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana perimbangan yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja keuangan daerah.

Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulina dkk., 2021; Monalisa & Indriasari, 2022; Padang & Padang, 2024; N. K. Putri & Darmayanti,

2019). Namun, peneliti lain menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Ardelia dkk., 2022; Verawaty dkk., 2020).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi umumnya memiliki pengelolaan sumber daya yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin fleksibel pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan keuangan yang berorientasi pada pembangunan (Halim, 2013). Kemandirian keuangan yang tinggi juga menunjukkan daya saing ekonomi daerah, yang berkontribusi pada peningkatan stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan cenderung memiliki keterbatasan dalam pengambilan kebijakan strategis, yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Taek, 2019). Dengan demikian, tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi diharapkan berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022; Rahmalita, 2023b). Namun, pada penelitian lain menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah (Ijtihad & Harspono, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Tingkat Kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Apabila ketergantungan ini terlalu besar, pemerintah daerah cenderung kurang memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah dan retribusi. Hal ini karena pemerintah daerah merasa cukup dengan dana yang diberikan pusat, sehingga tidak berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Akibatnya, semakin tinggi ketergantungan pada dana transfer, semakin rendah kemampuan daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, yang dapat menghambat pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah memiliki kesempatan lebih besar dalam mengelola anggarannya secara mandiri, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat kapasitas fiskalnya (Sedek & Kusumawati, 2024).

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah, semakin besar potensi kendala dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat peneliti terdahulu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada dana transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sedek & Kusumawati, 2024). Namun, terdapat peneliti lain yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Aulia & Rahmawaty, 2020; Musdirohmah & Sahri, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.5 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian , dan Tingkat Ketergantungan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan . Dana perimbangan yang dikelola secara efisien dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah (Mulia & Widiatmoko, 2025). Sementara itu, belanja modal yang tepat sasaran berkontribusi pada peningkatan aset dan sarana prasarana, memperkuat produktivitas daerah (Salsabila, 2022). Namun, jika dana tersebut dikelola secara kurang optimal atau daerah terlalu bergantung pada dana pusat, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi lebih mampu mengelola sumber daya dan kebijakan keuangan dengan lebih fleksibel dan efektif (Halim, 2013). Sebaliknya, daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana pusat cenderung kurang memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Sedek & Kusumawati, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap dana perimbangan, belanja modal, serta peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat penting untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, dimana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yang tepat, kemudian data dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2018). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yang terdiri dari kombinasi data *time series* dan *cross section*.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pulau Sumatera periode 2019-2023. Data diperoleh dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari 2025 sampai dengan Juli 2025.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sebuah karakteristik yang terdapat pada individu, objek, atau kegiatan yang telah ditetapkan variasinya oleh peneliti untuk diamati kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2018). Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel- variabel yang terkait dalam penelitian. Peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan menyelidiki hubungan antara variabel-variabel secara lebih terperinci. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah atau variabel terikat merupakan variabel yang dijadikan sebagai akibat atau variabel yang dipengaruhi karena ada variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang berperan sebagai penyebab

terjadinya perubahan atau yang memiliki pengaruh terhadap munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Tingkat Kemandirian (X_3), Tingkat Ketergantungan (X_4).

3.3.3 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah proses mendefinisikan variabel penelitian secara spesifik agar dapat diukur dengan jelas dan digunakan dalam analisis statistik. Operasional variabel mencakup definisi variabel, indikator yang digunakan, serta cara pengukurannya. Berikut penjelasan singkat mengenai operasional variabel :

1. Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonominya (Putri & Priyadi, 2021). Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi (2016) dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan asli daerah. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka kinerja keuangan dikatakan efektif, namun jika rasio yang dihasilkan kecil maka kinerja keuangan dikatakan tidak efektif. Menurut Mahmudi (2016) rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Belanja Modal (X_1)

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2013). Variabel belanja modal diukur berdasarkan persentase total belanja modal dibandingkan dengan belanja daerah yang direalisasikan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (Mahmudi, 2016). Belanja modal ini mencakup pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Menurut Mahmudi (2016) rumus persentase

belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Dana Perimbangan (X₂)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 2013). Variabel dana perimbangan diukur berdasarkan persentase dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang direalisasikan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (Mahmudi, 2016). Realisasi dana perimbangan tersebut terdiri dari akumulasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Mahmudi (2016) rumus persentase dana perimbangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Tingkat Kemandirian (X₃)

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan dan pengeluarannya tanpa ketergantungan yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Variabel tingkat kemandirian diukur dengan menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Mahmudi (2016) melalui perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat yaitu penjumlahan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Tingginya kemandirian suatu daerah ditandai dengan semakin rendahnya ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar, begitupun sebaliknya. Menurut Mahmudi (2016) rumus rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

5. Tingkat Ketergantungan (X₄)

Tingkat ketergantungan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah atau entitas bergantung pada sumber daya eksternal, seperti transfer dana

dari pemerintah pusat, dalam membiayai pengeluarannya (Aysiah, 2022). Variabel tingkat ketergantungan diukur dengan menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Mahmudi (2016) melalui perbandingan dana perimbangan dengan realisasi total pendapatan. Menurut Mahmudi (2016) rumus rasio ketergantungan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen		
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Efektivitas: $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Independen		
Belanja Modal	Persentase Belanja Moda: $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Perimbangan	Persentase Dana Perimbangan: $\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Tingkat Kemandirian	Rasio Kemandirian: $\frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$	Rasio
Tingkat Ketergantungan	Rasio Ketergantungan: $\frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi yaitu wilayah abstraksi yang mencakup subjek maupun objek yang berkualitas dan memiliki kriteria atau karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti sebagai bahan untuk dipelajari sehingga dapat menarik kesimpulan

(Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 34 kota di Pulau Sumatera periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Tabel 3.2
Kota di Pulau Sumatera

No.	Kota	Provinsi
1.	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Langsa	
3.	Lhokseumawe	
4.	Sabang	
5.	Subulussalam	
6.	Binjai	Sumatera Utara
7.	Gunungsitoli	
8.	Medan	
9.	Padangsidempuan	
10.	Pematangsiantar	
11.	Sibolga	
12.	Tanjungbalai	
13.	Tebing Tinggi	
14.	Bukittinggi	Sumatera Barat
15.	Padang	
16.	Padang Panjang	
17.	Pariaman	
18.	Payakumbuh	
19.	Sawahlunto	
20.	Solok	
21.	Dumai	Riau
22.	Pekanbaru	
23.	Batam	Kepulauan Riau
24.	Tanjungpinang	
25.	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
26.	Pagaralam	
27.	Palembang	
28.	Prabumulih	
29.	Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung
30.	Bengkulu	Bengkulu
31.	Jambi	Jambi
32.	Sungai Penuh	
33.	Bandar Lampung	Lampung
34.	Metro	

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pengambilan atau pengumpulan sampel pada suatu populasi, bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Sampel yang digunakan merupakan seluruh populasi, yaitu seluruh kota di Pulau Sumatera pada tahun anggaran 2019–2023, yang terdiri dari 34 kota. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel ditetapkan sampel dari penelitian ini sebanyak 170 data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Data tersebut diperoleh melalui dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diakses melalui situs resmi BPK RI, yaitu <https://www.bpk.go.id/>.

Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dianggap sudah cukup dan sesuai untuk menjawab rumusan masalah, karena semua variabel yang diteliti berasal dari data kuantitatif yang tercatat secara resmi oleh pemerintah. Teknik ini dipilih karena data yang digunakan bersifat objektif, sudah diperiksa, dan berasal dari lembaga negara yang terpercaya. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka tidak memerlukan data langsung dari wawancara atau observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Data panel merupakan kombinasi antara data time series (data dari waktu ke waktu) dan data cross section (data dari beberapa kota), yang dalam penelitian ini terdiri dari 34 pemerintah kota selama

periode tahun 2019 hingga 2023. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan *Software Econometric Views (EViews)* versi 12. Prosedur analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis pemilihan model dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data dengan menganalisis nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel. Metode ini memberikan pemahaman awal tentang distribusi data serta kecenderungan umum variabel yang diteliti (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Pemilihan Model

Terdapat tiga jenis data utama yang biasa digunakan dalam analisis statistik, yaitu data silang (*cross section*), data runtut waktu (*time series*), dan data panel. Data silang adalah data yang dikumpulkan dari banyak objek dalam satu waktu tertentu. Sementara itu, data runtut waktu adalah data dari satu objek yang diamati selama beberapa waktu. Sedangkan data panel adalah gabungan dari keduanya artinya, data panel mencakup banyak objek yang diamati dalam beberapa periode waktu (Ghozali, 2017).

Dengan menggunakan data panel, peneliti bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap objek, serta membandingkan antar objek. Hal ini membuat data panel lebih lengkap dan bermanfaat dibandingkan hanya menggunakan data silang atau runtut waktu saja.

Terdapat tiga pendekatan utama, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), yaitu sebagai berikut :

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model paling sederhana karena menggabungkan data dari berbagai daerah dan tahun tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing daerah. Model ini menganggap bahwa semua unit data memiliki perilaku yang sama. CEM biasanya digunakan jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara objek yang diamati (Ghozali, 2017).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa setiap unit analisis, seperti pemerintah kota, memiliki karakteristik unik yang tetap selama periode penelitian. Model ini menangkap perbedaan antar daerah dengan memberikan intersep yang berbeda untuk masing-masing unit, biasanya dengan bantuan variabel dummy. FEM cocok digunakan jika data menunjukkan perbedaan nyata antar daerah (Ghozali, 2017).

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) menganggap bahwa perbedaan antar unit tidak bersifat tetap, tetapi acak dan tidak berkorelasi dengan variabel lain dalam model. Melalui model REM, karakteristik khusus tiap daerah dimasukkan ke dalam komponen *error*. Model ini lebih tepat digunakan jika unit yang diteliti merupakan sampel acak dari populasi yang lebih luas (Ghozali, 2017).

3.6.2.1 Uji Pemilihan Model

Terdapat tiga jenis uji utama yang digunakan yaitu uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* sebagai berikut:

3.6.2.1.1 Uji *Chow*

Uji ini digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data lebih baik dianalisis dengan model yang menganggap tidak ada perbedaan antar unit (CEM) atau dengan model yang mengakomodasi perbedaan antar unit (FEM).

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai probabilitas dari uji lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect*. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan digunakan model *Fixed Effect* (Sugiyanto, 2022).

3.6.2.1.2 Uji *Hausman*

Setelah menentukan bahwa *Fixed* atau *Random Effect* yang akan digunakan, maka dilakukan uji *Hausman* untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti FEM lebih tepat digunakan. Namun jika nilai lebih besar dari 0,05, maka REM dianggap lebih cocok (Sugiyanto, 2022).

3.6.2.1.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Uji LM digunakan untuk apabila hasil dari dua uji sebelumnya, yaitu *Chow* dan *Hausman*, menunjukkan bahwa model yang digunakan bukanlah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka *Lagrange Multiplier Test* dipilih sebagai alternatif pengujian model.

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis *chi-square* (biasanya dilihat dari nilai probabilitas $< 0,05$), maka H_0 ditolak dan model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka model yang digunakan adalah *Common Effect* (Sugiyanto, 2022).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi dasar, sehingga estimasi parameter yang dihasilkan valid, tidak bias, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akurat. Pengujian ini penting untuk menjamin bahwa model regresi dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya dalam analisis statistik. Uji ini terdiri dari beberapa asumsi, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Adapun pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual adalah normal sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual penelitian tidak normal (Ghozali, 2018).

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara variabel independen. Regresi data panel yang baik jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Namun apabila terdapat korelasi antar variabel maka dapat mengganggu hubungan variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Sugiyanto, 2022).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat ketidaksamaan variabel dengan residual satu pengamat yang lain tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai probabilitas pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya (Sugiyanto, 2022).

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara residual pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan LM Test (*Breusch-Godfrey*), di mana nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik *Obs*R-squared* yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Hasil uji LM ini juga sejalan dengan nilai statistik *Durbin-Watson*, yang keduanya menunjukkan adanya indikasi autokorelasi dalam model regresi (Ghozali, 2017).

3.6.4 Analisis Model Terpilih

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis yakni melihat seberapa besar variabel bebas dan variabel terikat berpengaruh satu sama lain (Ghozali, 2017). Dengan persamaan umum sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Keuangan
- α : Nilai konstanta
- b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien Garis Regresi untuk X_1, X_2, X_3 dan X_4
- X_1 : Belanja Modal
- X_2 : Dana Perimbangan
- X_3 : Tingkat Kemandirian

X_4 : Tingkat Ketergantungan
 e : Faktor lain (faktor pengganggu)

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa baik dibangunnya model persamaan regresi. Tolak ukur baik tidaknya model ditentukannya oleh beberapa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin besarnya nilai koefisien determinasi maka model persamaan regresi yang dibangun semakin baik (Ghozali, 2018).

3.6.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Setelah pemilihan model dapat dilakukan uji F untuk memastikan kelayakannya. Tes ini mengevaluasi validitas model dengan menghitung persentase perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh setiap variabel independen. Pengujian simultan memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi semua variabel dependen secara bersamaan. Percobaan ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Tidak seperti uji t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi sama dengan nol. Uji F menguji hipotesis bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara bersama-sama sama dengan nol. Pengujian ini terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu dengan menggunakan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima sedangkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018).

3.6.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis secara parsial melalui Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan Hipotesis Statistik
 - $H_0 : \beta_i = 0$, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

- $H_a : \beta_i \neq 0$, maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.

c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2018).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Guna memahami arah perkembangan variabel secara lebih komprehensif, dilakukan analisis tren terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, Tingkat Ketergantungan, serta Kinerja Keuangan Pemerintah Kota. Analisis ini menyajikan nilai rata-rata tahunan dari masing-masing variabel pada setiap kota selama lima tahun berturut-turut, serta rata-rata keseluruhan antar pemerintah kota dalam setiap tahun. Oleh karena itu, tren ini tidak hanya menggambarkan dinamika antar waktu, tetapi juga mengungkap perbedaan antar unit dalam hal pengelolaan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan. Pola-pola yang muncul dari data tren tersebut dapat menjadi indikator awal atas potensi pengaruh antar variabel yang akan dianalisis lebih lanjut melalui uji regresi. Tren dari masing-masing variabel akan digambarkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.1
Tren Belanja Modal per Kota Selama 5 Tahun



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.2

Tren Belanja Modal per Tahun

Berdasarkan gambar 4.1 data rata-rata belanja modal selama periode 2019 hingga 2023, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar pemerintah kota di Pulau Sumatera. Beberapa kota menunjukkan alokasi belanja modal yang cukup tinggi, seperti Kota Lubuk Linggau dengan rata-rata tertinggi (31,87%), disusul oleh Pagaralam (29,56%), dan Jambi (26,88%). Sebaliknya, kota-kota seperti Padangsidempuan (13,34%), Padang Panjang (11,14%), dan Tanjungbalai (10,93%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi belanja modal selama lima tahun tersebut.

Adapun pada gambar 4.2 belanja modal pemerintah kota di Pulau Sumatera menunjukkan tren menurun. Tahun 2019 mencatat angka tertinggi sebesar 22,20%, lalu turun menjadi 18,57% pada 2020. Penurunan berlanjut di 2021 menjadi 18,09%, namun pada 2022 menjadi 18,47%, dan kembali turun ke 16,29% pada 2023. Tren ini mengindikasikan pengurangan alokasi belanja modal, kemungkinan karena fokus pada belanja operasional atau keterbatasan fiskal.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.3
Tren Dana Perimbangan per Kota Selama 5 Tahun



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.4
Tren Dana Perimbangan per Tahun

Berdasarkan gambar 4.3 data rata-rata dana perimbangan selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kota menunjukkan dana perimbangan yang cukup tinggi, seperti Kota Tanjung Balai dengan rata-rata tertinggi (82,90%), disusul oleh Solok (82,34%), dan Padangsidimpuan (79,70%). Sebaliknya, kota-kota seperti Palembang (48,14%), Medan (42,19%), dan Batam (40,97%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi dana perimbangan selama lima tahun tersebut.

Adapun pada gambar 4.4, tren rata-rata dana perimbangan pemerintah kota di Pulau Sumatera menunjukkan menunjukkan fluktuasi ringan namun cenderung

meningkat. Proporsi dana perimbangan pada tahun 2019 sebesar 69,86%, lalu menurun menjadi 68,55% di 2020 dan sedikit turun lagi ke 68,42% pada 2021. Namun, tren ini berbalik arah dengan kenaikan pada tahun 2022 sebesar 69,37% dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan relatif konsisten dan bahkan meningkat di tahun terakhir.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.5
Tren Tingkat Kemandirian per Kota Selama 5 Tahun



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.6
Tren Tingkat Kemandirian per Tahun

Berdasarkan gambar 4.5 data rata-rata rasio kemandirian selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kota menunjukkan rasio kemandirian yang cukup tinggi, seperti Kota Batam dengan rata-rata tertinggi (64,15%), disusul oleh Medan (56,84%), dan Palembang (37,27%). Sebaliknya, kota-kota seperti Solok

(5,68%), Pariaman (4,44%), dan Gunungsitoli (2,73%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi kemandirian selama lima tahun tersebut.

Adapun pada gambar 4.6 terlihat adanya peningkatan secara bertahap. Tahun 2019 tingkat kemandirian berada di angka 23,69% dan sedikit menurun pada 2020 menjadi 23,34%. Namun, sejak 2021 tren mulai meningkat signifikan, yakni 25,26% di 2021, naik menjadi 28,94% di 2022, dan mencapai 29,44% pada 2023.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.7

Tren Tingkat Ketergantungan per Kota Selama 5 Tahun



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.8

Tren Tingkat Ketergantungan per Tahun

Berdasarkan gambar 4.7 data rata-rata rasio ketergantungan selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kota menunjukkan rasio ketergantungan yang cukup tinggi, seperti Kota Pariaman dengan rata-rata tertinggi (92,63%), disusul

oleh Sungai Penuh (91,57%), dan solok (91,13%). Sebaliknya, kota-kota seperti Palembang (61,30%), medan (59,02%), dan Batam (52,34%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata proporsi ketergantungan selama lima tahun tersebut.

Adapun pada gambar 4.8 tingkat ketergantungan pemerintah kota di Pulau Sumatera cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Setelah sempat turun dari 81,12% pada 2019 menjadi 80,75% di 2021, angkanya kembali naik menjadi 80,96% pada 2022 dan bertahan di angka yang sama pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer.



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.9

Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Efektivitas per Kota Selama 5 Tahun



Sumber: BPK RI, 2025 (data diolah)

Gambar 4.10

Tren Kinerja Keuangan dengan Rasio Efektivitas per Tahun

Berdasarkan gambar 4.9 data rata-rata kinerja keuangan dengan rasio

efektivitas selama periode 2019 hingga 2023, terdapat beberapa kota menunjukkan rasio efektivitas yang cukup tinggi, seperti Kota Pagaralam (115,60%), disusul oleh Pematangsiantar (111,02%), dan Metro (110,50%). Sebaliknya, kota-kota seperti Sibolga (70,94%), Bandar Lampung (55,41%), dan Binjai (51,48%) menempati posisi tiga terendah dalam rata-rata tingkat ketergantungan pada 2019-2023.

Adapun pada gambar 4.10 terdapat tren kinerja keuangan selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Tahun 2019 tercatat sebesar 88,13% dan meningkat menjadi 92,17% pada 2020, namun di tahun 2021 turun menjadi 83,84% kinerja sedikit membaik di 2022 menjadi 85,58%, lalu kembali menurun menjadi 83,15% di 2023.

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder Pemerintah Kota di Pulau Sumatera tahun 2019–2023, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik data sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai rata-rata (mean), *standar deviasi*, nilai minimum, dan maksimum dari setiap variabel. Metode ini memberikan pemahaman awal mengenai distribusi data serta kecenderungan umum variabel yang diteliti (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan sampel 34 kota dengan total 170 observasi selama periode 2019 hingga 2023. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	-0.056632	-0.759219	-0.165866	-0.701700	-0.096044
Median	-0.051222	-0.755232	-0.137154	-0.741124	-0.077378
Maximum	1.944335	-0.433916	-0.073041	0.078602	-0.022414
Minimum	-0.397072	-1.943095	-0.421475	-1.422508	-0.297311
Std. Dev.	0.204542	0.181107	0.077767	0.312438	0.061030
Skewness	6.318376	-1.769360	-1.499391	0.311661	-1.369240
Kurtosis	59.86404	12.28802	4.931063	2.768142	4.412714
Jarque-Bera	24035.22	699.7620	90.11206	3.132870	67.25648
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.208788	0.000000
Sum	-9.627509	-129.0672	-28.19715	-119.2890	-16.32745
Sum Sq. Dev.	7.070541	5.543180	1.022073	16.49738	0.629476
Observations	170	170	170	170	170

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah observasi setiap variabel adalah sebanyak 170 dan berikut penjelasan dari masing-masing variabel:

Variabel Kinerja Keuangan (Y) diukur dengan Rasio Efektifitas dengan perbandingan Realisasi PAD dan Anggaran PAD pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Kinerja keuangan memiliki nilai minimum sebesar -0.397072 di Kota Sibolga tahun 2023, nilai maksimum sebesar 1.944335 di kota Gunungsitoli tahun 2020. Memiliki Nilai rata-rata sebesar -0.056632 dan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0.204542.

Variabel Belanja Modal (X_1) diukur dengan Belanja Modal dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar -1.943095 di Kota Payakumbuh tahun 2023, nilai maksimum sebesar -0.433916 di Kota Lubuk Linggau tahun 2023. Memiliki nilai rata-rata sebesar -0.759219 dan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0.181107.

Variabel dari Dana Perimbangan (X_2) diukur dengan Dana Perimbangan dibandingkan dengan Total Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dana Perimbangan memiliki minimum dari sebesar -0.421475 di Kota Batam tahun 2019, nilai maksimum -0.073041 di Kota Tanjung Balai Tahun 2019. Memiliki nilai rata-rata sebesar -0.165866 dan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0.077767.

Variabel dari Tingkat Kemandirian (X_3) diukur dengan Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Bantuan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Tingkat Kemandirian memiliki nilai minimum sebesar -1.422508 di Kota Gunungsitoli tahun 2021, nilai maksimum sebesar 0.078602 di Kota Batam tahun 2023. Memiliki nilai rata-rata sebesar -0.701700 dan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0.312438.

Variabel dari Tingkat Ketergantungan (X_4) diukur Dengan Total Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar -0.297311 di Batam tahun 2023, nilai maksimum sebesar -0.022414 di Gunungsitoli tahun

2023. Memiliki nilai rata-rata sebesar -0.096044 dan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0.061030.

4.1.2 Analisis Pemilihan Model

Berdasarkan ketiga model data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) maka akan dipilih model mana yang paling tepat untuk mengestimasi model persamaan regresi yang diinginkan dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier* (Sugiyanto, 2022) sebagai berikut:

4.1.2.1 Uji Pemilihan Model

4.1.2.1.1 Uji Chow

Uji *chow* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section F* > nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.
2. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section F* < nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (Sugiyanto, 2022).

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.332972	(33,132)	0.1303
Cross-section Chi-square	48.894442	33	0.0369

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Hasil dari uji *chow* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section F* sebesar $0,1303 > 0,05$, artinya H_0 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.1.2.1.2 Uji Hausman

Uji *hausman* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas untuk cross section random $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.
2. Apabila nilai probabilitas untuk cross section random $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (Sugiyanto, 2022).

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.958545	4	0.0270

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Hasil dari uji *hausman* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random* sebesar $0,0270 < 0,05$, artinya H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Fix Effect Model*. Karena saat uji *chow* dan uji *hausman* hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

4.1.2.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model* dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai *cross section* Breusch-Pagan $>$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.
2. Apabila nilai *cross section* Breusch-Pagan $<$ nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (Sugiyanto, 2022).

Tabel 4.4
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Null hypotheses: No effects Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all other) alternatives	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.003165	0.012895	0.016060
	(0.9551)	(0.9096)	(0.8992)

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Hasil dari uji *lagrange multiplier* menunjukkan bahwa nilai probabilitas

Bruesch-Pagan sebesar $0,9551 > 0,05$, artinya H_0 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4.5
Hasil Uji Pemilihan Model

Jenis Uji	Probabilitas	Kriteria	Kesimpulan
Uji Chow	0,1303	$> 0,05$	CEM
Uji Hausman	0,0270	$< 0,05$	FEM
Uji Lagrange Multiplier	0,9551	$> 0,05$	CEM

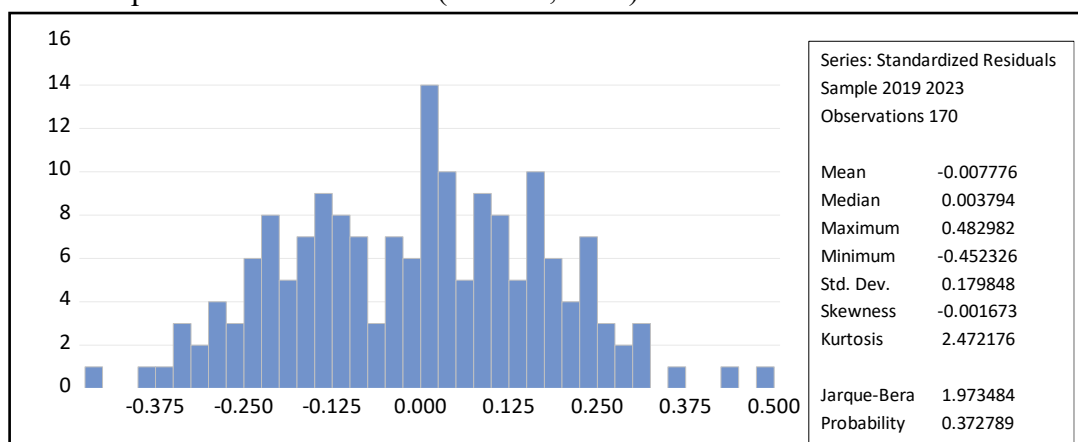
Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah menentukan model yang tepat untuk digunakan dalam persamaan regresi data panel adalah *Common Effect Model*, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi sebagai berikut:

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual penelitian adalah normal sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual penelitian tidak normal (Ghozali, 2018).



Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Gambar 4.11
Hasil Uji Normalitas

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas yaitu dengan nilai probabilitas $0.372789 > 0,05$ maka variabel tersebut dikatakan terdistribusi secara normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Sugiyanto, 2022).

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors Date: 05/15/25 Time: 12:35 Sample: 1 170 Included observations: 170			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.032343	135.6893	NA
X1	0.008482	21.67323	1.160385
X2	0.224588	31.58692	5.664869
X3	0.014529	35.92717	5.915065
X4	0.557775	30.25064	8.664824

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil VIF (*Variance Inflation Factor*) antar variabel independent menunjukkan bahwa nilai tolerance nya lebih kecil dari <10 yang artinya tidak terjadinya multikolinieritas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada tabel dibawah ini :

- Apabila nilai probabilitas *Chi-square* < 0.05 maka H_0 diterima, maka terdapat heteroskedastisitas.

- b. Apabila nilai probabilitas *Chi-square* > 0.05 maka H_0 ditolak, maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Sugiyanto, 2022).

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.494845	Prob. F(4,165)	0.2061
Obs*R-squared	5.945131	Prob. Chi-Square(4)	0.2033

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi prob *Chi-Square* $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Apabila terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari probabilitas *chi-square* (Ghozali, 2017).

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.475480	Prob. F(2,163)	0.6224
Obs*R-squared	0.986045	Prob. Chi-Square(2)	0.6108

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dari nilai signifikansi prob $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.1.4 Analisis Model Terpilih

Berdasarkan metode estimasi regresi antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) serta pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*, maka terpilihlah *Common Effect Model* (CEM) untuk persamaan regresi linear data panel. Hasil perhitungan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 05/16/25 Time: 09:04 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 34 Total panel (balanced) observations: 170				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.304484	0.179840	-1.693079	0.0923
X1	0.084044	0.092100	0.912530	0.3628
X2	0.524461	0.473907	1.106676	0.2700
X3	-0.295028	0.120535	-2.447666	0.0154
X4	-1.995217	0.746843	-2.671534	0.0083

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Model estimasi yang diperoleh dari *Common Effect Model* (CEM) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = -0.304484 + 0.084044 \cdot X_1 + 0.524461 \cdot X_2 - 0.295028 \cdot X_3 - 1.995217 \cdot X_4 + e$$

Hasil dari persamaan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa:

Nilai konstanta (α) sebesar 0,304484 sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya variabel belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan maka variabel kinerja keuangan pemerintah kota mengalami penurunan sebesar 0,304484.

Nilai koefisien variabel belanja modal sebesar 0,084044, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel belanja modal mengalami peningkatan bernilai 1 dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,084044.

Nilai koefisien variabel dana perimbangan sebesar 0,524461, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel dana perimbangan mengalami peningkatan bernilai 1 dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,524461.

Nilai koefisien variabel tingkat kemandirian sebesar 0,295028, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel tingkat kemandirian mengalami peningkatan bernilai 1 dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka akan menurunkan kinerja

keuangan sebesar 0,295028. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kota.

Nilai koefisien variabel tingkat ketergantungan sebesar 1,995217 sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel tingkat ketergantungan mengalami peningkatan senilai 1 dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka akan menurunkan Kinerja Keuangan sebesar 199,52%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat terhadap kinerja keuangan pemerintah kota.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini untuk mengetahui besaran nilai korelasi antara variabel independen (Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan). Berikut ini output untuk uji koefisien determinasi (R^2) yang diolah dengan program *Eviews* versi 12 pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.198316	R-squared	0.054395
Mean dependent var	-0.056632	Adjusted R-squared	0.031472
S.D. dependent var	0.204542	S.E. of regression	0.201298
Akaike info criterion	-0.339092	Sum squared resid	6.685936
Schwarz criterion	-0.246862	Log likelihood	33.82278
Hannan-Quinn criter.	-0.301666	F-statistic	2.372882
Durbin-Watson stat	2.161635	Prob(F-statistic)	0.054378

Sumber: Output *Eviews* 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,0544. Artinya, sebesar 5,43% variasi dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan yang digunakan dalam model. Sementara itu, 94,57% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Nilai R^2 yang rendah ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas

faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, tetapi juga dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian hasil analisis dengan harapan teoritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat ketergantungan yang berpengaruh negative signifikan dan sesuai arah teoritis. Sementara itu, belanja modal dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan, dan tingkat kemandirian justru menunjukkan pengaruh negatif, meskipun secara teori diharapkan memiliki pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara optimal.

4.1.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2017). Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi model regresi secara keseluruhan dengan memperhatikan nilai F_{hitung} serta probabilitasnya berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Hasil dari Uji F dapat dilihat dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Probabilitas
2.372882	2.4	0,054378

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji nilai F_{hitung} sebesar 2.372882 dengan pembulatan 2.4 dengan nilai probabilitas sebesar 0,054378 dengan pembulatan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang sama besar dengan nilai F_{tabel} ($2.4 = 2.4$), dan dengan nilai probabilitas $0,05 = 0,05$. Maka H_0 ditolak yang artinya belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

4.1.5.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan (Ghozali, 2017). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.12:

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Variabel	Probabilitas Variabel	Probabilitas	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
X ₁	0.3628	> 0.05	0.912530	< 1.974185	Tidak Berpengaruh
X ₂	0.2700	> 0.05	1.106676	< 1.974185	Tidak Berpengaruh
X ₃	0.0154	< 0.05	2.447666	> 1.974185	Berpengaruh
X ₄	0.0083	< 0.05	3.045497	> 1.974185	Berpengaruh

Sumber: Output Eviews 12, 2025 (data diolah)

Variabel belanja modal (X₁) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.912530. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.912530 < 1.974185$) dan nilai probabilitas $0.3628 > 0.05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

Variabel Dana Perimbangan (X₂) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.106676. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.106676 < 1.974185$) dan nilai probabilitas $0,2700 > 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

Variabel Tingkat Kemandirian (X₃) memiliki nilai t_{hitung} sebesar - 2.447666. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2.447666 > 1.974185$) dan nilai probabilitas $0,0154 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

Variabel Tingkat Ketergantungan (X₄) memiliki nilai t_{hitung} sebesar - 3.045497. Hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($- 3.045497 > 1.974185$) dan nilai probabilitas $0,0083 < 0,05$. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera dengan menguji berpengaruh atau tidaknya variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023) yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.12 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Belanja Modal memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.912530 < 1.974185$) dan nilai probabilitas (X_1) $0.3628 > 0.05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera dan H_1 dalam penelitian ini yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak.

Interpretasi penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin dibandingkan belanja modal dan infrastruktur, padahal keduanya berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Belanja modal seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah, namun apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, maka besarnya belanja modal berisiko tidak memberikan manfaat yang signifikan (Meilanda, 2023).

Meskipun belanja modal telah dialokasikan, dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak selalu terlihat secara langsung karena sifatnya yang jangka panjang dan hasilnya belum tentu muncul dalam periode anggaran yang sama. Selain itu, porsi belanja modal yang relatif kecil dalam APBD membatasi kontribusinya terhadap efektivitas keuangan daerah. Berdasarkan data, banyak kota di Sumatera yang hanya mengalokasikan belanja modal di bawah 20% dari total belanja, bahkan beberapa di antaranya di bawah 10%, seperti di Kota Medan di tahun 2020 sebesar 7,72%, Kota Solok tahun 2020 sebesar 6,45% dan Kota Tanjungbalai tahun 2021 sebesar 7,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal belum menjadi prioritas utama, sehingga wajar jika kontribusinya terhadap kinerja keuangan tidak signifikan. Apabila belanja modal tidak diarahkan pada sektor yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pengaruhnya

terhadap kinerja keuangan menjadi minim. Belanja modal yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa pengelolaannya belum dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali perencanaan dan pengelolaan investasi tersebut agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan (Hendaris & Sastradipraja, 2024).

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, di mana pemerintah pusat berperan sebagai pemberi mandat (prinsipal) dan pemerintah daerah sebagai pelaksana (agen) yang mengelola dana untuk kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah pusat mengharapkan agar dana, termasuk belanja modal, digunakan secara efisien untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola belanja modal dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, alokasi yang tidak tepat sasaran, atau proyek yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian tujuan antara pusat dan daerah serta lemahnya pengawasan, yang mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan hubungan agensi antara pusat dan daerah.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan Aryllan & Achmad (2024), Hendaris & Sastradipraja (2024), Indriastuti & Satriawan (2023), dan Meilanda dkk (2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah dkk (2022) dan Ratnasari & Meirini (2022), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas perencanaan dan pengelolaan belanja modal agar dapat mendukung tujuan pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.13 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Dana Perimbangan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.106676 < 1.974185$) dan nilai probabilitas (X_2) $0.2700 > 0.05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera dan H_2 dalam penelitian ini yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak.

Analisis data mengindikasikan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana tersebut. Banyak daerah belum mampu mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, sehingga tetap bergantung pada dana transfer. Sebagai contoh, Kota Binjai memiliki persentase dana perimbangan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 75% selama lima tahun terakhir, namun kinerja keuangannya tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding. Sebaliknya, Kota Batam yang hanya menerima dana perimbangan sebesar 30-40% selama 5 tahun terakhir justru menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih baik. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa pembagian dana perimbangan belum mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah secara adil. Banyaknya dana perimbangan belum tentu meningkatkan kinerja keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, daerah yang lebih mandiri dan efisien dalam mengelola keuangannya bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik meskipun mendapat dana transfer lebih sedikit. Lemahnya perencanaan, rendahnya kualitas pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan juga turut menjadi faktor yang menyebabkan penggunaan dana menjadi tidak efektif. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan kewenangan dan fleksibilitas dalam mengelola sumber pendapatan sendiri, sehingga prinsip otonomi daerah menjadi

sulit terwujud (Khadijah dkk., 2022). Oleh karena itu, meskipun dana perimbangan dimaksudkan untuk mendukung kinerja keuangan, dalam praktiknya belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Justru, tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan menjadi hambatan utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah (Manggara, 2024).

Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, di mana pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dikelola dalam rangka mendukung pembangunan dan meningkatkan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada dana dari pusat dan belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai agen dengan baik. Selain itu, pembagian dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan, menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan prinsipal dan tindakan agen, yang merupakan salah satu permasalahan dalam hubungan agensi.

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian Aryllan & Achmad (2024), Khadijah dkk (2022) dan Ramadani & Muslimin (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini & Widajantie (2024), Indriastuti & Satriawan (2023), Safitri dkk (2023) dan Ardelia dkk (2022) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat dan belum optimalnya pengelolaan dana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menjalankan perannya secara

efektif sebagai agen dalam hubungan agensi, sehingga tujuan peningkatan kinerja keuangan belum tercapai secara maksimal.

4.2.3 Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.13 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Tingkat Kemandirian memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.447666 > 1.974185$) dan nilai probabilitas (X_3) $0,0154 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Tingkat Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera dan H_3 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tingkat kemandirian fiskal dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui PAD, justru semakin menurun kinerja keuangannya. Hal ini dapat terjadi karena daerah dengan PAD yang besar cenderung mengalokasikan belanja lebih besar untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai dan operasional, bukan pada belanja produktif yang mendorong pembangunan. Selain itu, usaha meningkatkan PAD sering kali dilakukan tanpa strategi yang tepat, misalnya dengan menaikkan pajak dan retribusi secara berlebihan, yang justru membebani masyarakat dan menurunkan daya beli serta pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD cukup besar, pengelolaan keuangan yang kurang optimal masih menjadi kendala dalam mencapai kemandirian yang lebih baik (Rama, 2024).

Selama periode 2019–2023, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa daerah, seperti Batam dan Medan, menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, dengan rasio kemandirian di atas 100%. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di daerah-daerah tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, beberapa kota dengan tingkat kemandirian yang rendah, seperti Gunungsitoli, Pariaman, dan Sungai Penuh, justru menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil.

Temuan ini memperkuat hasil pengujian bahwa tingkat kemandirian yang tinggi, jika tidak diiringi dengan tata kelola keuangan yang baik, justru dapat berdampak negatif terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Hal ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Meskipun daerah seperti Batam dan Medan sudah mampu membiayai banyak kebutuhannya sendiri, hal itu belum tentu berarti anggaran mereka digunakan secara efisien. Pendapatan yang besar kadang membuat pengeluaran menjadi boros atau tidak terkontrol. Sebaliknya, daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas justru cenderung lebih berhati-hati dan fokus pada kebutuhan utama. Karena dana mereka terbatas, mereka lebih disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, tingkat kemandirian yang tinggi perlu disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola agar dapat mendorong kinerja keuangan daerah secara menyeluruh (Ahrend dkk.,2021).

Hasil bahwa tingkat kemandirian berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui teori agensi. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola dan membiayai pengeluarannya sendiri, terutama melalui PAD. Namun, ketika tingkat kemandirian meningkat tanpa diikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik, justru dapat menurunkan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa agen belum mampu menggunakan kewenangan yang diberikan secara efektif dan efisien. Apabila dilihat dari hubungan agensi, kondisi ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu menggunakan kewenangannya dengan tepat, karena lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kemandirian yang tinggi perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat agar tujuan utama peningkatan kinerja keuangan dapat tercapai.

Sesuai dengan hasil penelitian Mulia & Widiatmoko (2025), studi ini juga menemukan bahwa tingkat kemandirian berdampak negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hakiki dkk (2023) dan Ijtihad & Harspono (2023)

yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Daerah yang memiliki PAD tinggi belum tentu mampu mengelola keuangannya dengan baik. Tanpa pengelolaan yang efektif, kemandirian justru bisa menurunkan kinerja. Karena itu, kemandirian perlu disertai dengan tata kelola dan pengawasan yang baik.

4.2.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis, Tingkat Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.13 dan dari hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji-t, variabel Tingkat Ketergantungan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.045497 > 1.974185$) dan nilai probabilitas (X_4) $0,0083 < 0,05$. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Tingkat Ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera artinya dan H_4 dalam penelitian ini yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Melalui hasil analisis, diketahui bahwa ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hubungan negatif antara tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dibandingkan dengan total pendapatan mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat, semakin tinggi pula ketergantungan daerah tersebut. Ketergantungan yang tinggi ini dapat mengakibatkan rendahnya penilaian terhadap akuntabilitas dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan secara mandiri yang dapat mengoptimalkan pendapatan transfer. Tingginya proporsi dana perimbangan mencerminkan ketidakmandirian dalam mengelola pendapatan daerah (Meilanda, 2023).

Berdasarkan hasil analisis tahun 2019–2023, sebagian besar kota di Pulau Sumatera menunjukkan tingkat ketergantungan di atas 80%, yang tergolong dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini memperkuat hasil uji yang menunjukkan bahwa semakin besar porsi dana transfer yang diterima suatu daerah, maka cenderung

semakin rendah efektivitas pengelolaan keuangannya. Daerah seperti Batam, Medan, dan Palembang, yang memiliki tingkat ketergantungan lebih rendah di bawah 60% dibandingkan kota lainnya, menunjukkan kecenderungan kinerja keuangan yang lebih baik, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas anggaran. Sebaliknya, daerah seperti Gunungsitoli, Sungai Penuh, dan Pariaman yang memiliki tingkat ketergantungan di atas 90% menghadapi tantangan dalam meningkatkan efektivitas fiskal secara berkelanjutan. Walaupun beberapa dari daerah tersebut dapat menjaga stabilitas keuangan dalam arti mampu mengelola anggaran secara hati-hati, ketergantungan yang tinggi tetap menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan kapasitas fiskal secara optimal. Dengan demikian, ketergantungan yang tinggi secara umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera, terutama dalam aspek penguatan kemandirian dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, di mana pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat dan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola keuangan demi kepentingan publik. Namun, ketika tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi, pemerintah daerah cenderung kurang berinisiatif untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dan lebih mengandalkan dana dari pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa agen belum menjalankan perannya secara maksimal. Ketika daerah tidak berusaha meningkatkan kemandirian fiskalnya, maka pengelolaan keuangan menjadi kurang efisien, kurang terukur, dan tidak sepenuhnya akuntabel. Akibatnya, hal ini berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah itu sendiri. Menurut konteks agensi, hal ini juga mencerminkan pentingnya kontrol dan insentif dari pusat agar daerah terdorong untuk mengelola keuangan dengan lebih bertanggung jawab.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilanda dkk (2023), Lestari dkk (2019) dan Suryaningsih & Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aulia & Rahmawaty (2020) dan Patonah dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pusat, semakin rendah efektivitas pengelolaan keuangannya. Ketergantungan yang tinggi membuat daerah kurang mandiri dan kurang termotivasi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menekankan pentingnya tanggung jawab agen (pemerintah daerah) dalam mengelola dana dari prinsipal (pemerintah pusat) secara efisien dan akuntabel.

4.2.5 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji nilai F_{hitung} sebesar 2.372882 dengan pembulatan 2.4 dengan nilai probabilitas sebesar 0.054378. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($2.4 \geq 2.4$), dan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi $0.054378 \leq 0,05$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang artinya belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak cukup jika hanya dilihat dari satu faktor secara parsial, melainkan perlu dianalisis secara simultan karena adanya hubungan yang saling memengaruhi antar variabel. Belanja modal yang dialokasikan secara tepat dapat meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Dana perimbangan yang tinggi dapat membantu pembiayaan pembangunan, tetapi jika tidak disertai dengan upaya peningkatan kemandirian, maka dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan menurunkan fleksibilitas pengelolaan anggaran. Tingkat

kemandirian yang tinggi menandakan kekuatan fiskal daerah, sementara tingkat ketergantungan mencerminkan keterbatasan dalam otonomi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, keterpaduan antara keempat variabel ini menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja keuangan yang efektif.

Apabila ditinjau dari perspektif teori agensi, temuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah sebagai agen dari pemerintah pusat (prinsipal). Daerah tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi anggaran, tetapi juga harus menunjukkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Ketika seluruh variabel tersebut saling mendukung, maka peran daerah sebagai agen dapat berjalan lebih optimal, sehingga tujuan fiskal yang ditetapkan oleh pusat dapat tercapai dengan lebih baik. Ini sekaligus mencerminkan perlunya pengawasan yang efektif dari pusat serta insentif yang mendorong daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri dan bertanggung jawab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Modal (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.912530 < 1.974185$), nilai probabilitas $0.3628 > 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dan pengelolaan belanja modal belum optimal dalam mendorong efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar belanja modal benar-benar mendukung peningkatan kinerja keuangan melalui sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan.
2. Variabel Dana Perimbangan (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.106676 < 1.974185$), nilai probabilitas $0,2700 > 0,05$. Hal ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat dan kurang optimalnya pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan dana perimbangan guna memperbaiki kinerja keuangan.
3. Variabel Tingkat Kemandirian (X_3) secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.447666 > 1.974185$), nilai probabilitas $0,0154 < 0,05$, dan hubungan antara kedua variabel bersifat negatif (tidak searah). Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, justru kinerja keuangannya cenderung menurun jika tidak dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang efektif. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan terarah agar kemandirian benar-benar mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.
4. Variabel Tingkat Ketergantungan (X_3) secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3.045497 > 1.974185$), nilai probabilitas $0,0083 < 0,05$ dan hubungan antara kedua variabel bersifat negatif (tidak searah). Artinya, semakin tinggi tingkat ketergantungan

suatu daerah, justru kinerja keuangannya akan menurun dan melemahkan motivasi daerah untuk menggali PAD. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana secara efisien dan akuntabel.

5. Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2.372882 dengan pembulatan 2.4 sama dengan F_{tabel} sebesar 2.4 dengan nilai probabilitas sebesar 0,054378 dengan pembulatan 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan, tingkat kemandirian, dan tingkat ketergantungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Pulau Sumatera. Hasil ini menandakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh keterpaduan berbagai faktor fiskal, dan tidak bisa dilihat secara terpisah. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola dana publik secara efisien dan mandiri.

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota di Pulau Sumatera diminta agar kegiatan belanja modal dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan daerahnya. Belanja modal yang besar harus diiringi dengan perencanaan pembangunan yang maksimal dan diikuti dengan pengelolaannya yang akuntabel. Dengan demikian, dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.
2. Pemerintah kota di Pulau Sumatera diminta untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana perimbangan melalui perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan dana perimbangan hendaknya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dimaksimalkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta kinerja keuangan daerah.
3. Pemerintah kota di Pulau Sumatera perlu memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan asli

daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Dengan peningkatan kemandirian ini, diharapkan pemerintah dapat mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan sehingga kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik.

4. Bagi Pemerintah Kota di Pulau Sumatera diminta dapat memanfaatkan secara maksimal dana ditransfer yang didapatkan agar tingkat ketergantungan yang tinggi dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan cara terus meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah.

5.2.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain untuk memperluas hasil analisis kinerja keuangan. Selain itu, rentang waktu penelitian sebaiknya diperpanjang, dan cakupan wilayah diperluas ke daerah lain agar hasilnya lebih menyeluruh dan menggambarkan kondisi secara umum. Hal ini penting dilakukan mengingat nilai *R-squared* pada penelitian ini relatif kecil, sehingga masih terdapat variabel lain di luar model yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Anggraini, U. A., & Widajantie, T. D. (2024). *Influence of Regional Original Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of the Regional Government of Jombang District in 2018–2022. International Journal of Economy, Education, and Entrepreneurship*.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.
- Arusani, Kusuma, U. W., & Harimau, L. I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Economics Technologi and Entrepreneur*.
- Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*,. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>.
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Aysiah, I. S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun*.
- Desky, D. A., Erlina, & Sirozuzilam. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Trias Politika*, <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.5064>.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika.

- Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*.
- Hendaris, R. B., & Sastradipraja, U. (2024). *Analysis of Factors Affecting Local Government Financial Performance. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(5), 5399–5404.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2023). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 41–50. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/gara>.
- Indriastuti, L., & Satriawan, B. (2023). Pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi. *Zona Keuangan*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. In *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>.
- Jong, D., Tsvetkova, A., Lembcke, A. C., & Ahrend, R. (2021). *A comprehensive approach to understanding urban productivity effects of local governments: Local autonomy, government quality and fragmentation. OECD Regional Development Papers No. 11. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. <https://dx.doi.org/10.1787/5ebd25d3-en>
- Juwita, A., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal EMT kita*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Sejarah dan Peran KKP dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut*.
- Khadijah, S., Batubara, M., & Rahmani, N. A. B. (2022). *The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Capital Expenditures on the Government's Financial Performance in the Regency/City of North Sumatra Province. Budapest International Research and Critics Institute-Journal*.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 2337–3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit BPK terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). *Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Kemandirian Fiskal*. 6(4), 34–46.
- Mahendra, A., & Barus, B. N. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8842–8852.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn.
- Meilanda, P., Periansya, & Armaini, R. (2023). Determinan Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, VIII.
- Monalisa, & Indriasari, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Analisis Pertumbuhan Dan Rasio Keuangan. *Jurnal Syntax Admiration*, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462>.
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah periode 2019–2023). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 2142–2152.
- Musdirohmah, A., & Sahri, Y. (2022). Pengaruh Ukuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 566–576.
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3524>.
- Patonah, I. S., Nilasari, Y., & Pertiwi, T. P. (2023). Analisis rasio ketergantungan

keuangan daerah terhadap nilai kinerja keuangan pemerintah desa. *ASWAJA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 10–18.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>.

Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara. (2023). *Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara*.

Putri, N. K., & Darmayanti, N. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>.

Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh Leverage , Dana Perimbangan , Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–16.

Rahayu, Y. W., Nugroho, T. R., Isnaini, N. F., & Hartono. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2000>.

Rahmalita, A. (2023). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Saat Pandemi Covid-19*.

Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>.

Ramadani, A. F., & Muslimin. (2022). Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 4(1), 362–372.

<https://doi.org/10.31539/jomb.v4i1.3710>

- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>.
- Safitri, B. W., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). *The Effect of PAD, Capital Expenditures, Government Size, and Budget Changes on Regional Financial Performance (in Central Java Province in 2019–2021)*. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*.
- Sakir, M., Trisna, & Pende, H. H. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.56630/paraduta.v1i3.522>.
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah , Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022 di Indonesia . Sistem pemerintahan pada masa orde baru yang terpusat (sentralisasi kekuas. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2).
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*.
- Sedek, S. B. T., & Kusumawati, E. (2022). Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Social Science Research*, 4(1). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Sugiyanto. (2022). Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. In Academia Publication.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A., & Gusmao, C. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akutansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik pemerintah daerah dan opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1453–1481.
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telpun (0711) 353014

Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak.
NIP : 197804102005012020
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Pihak Pertama,

Palembang, April 2025

Pihak Kedua,

Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM 062140512628

Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197804102005012020

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpun (0711) 353414

Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pihak Kedua

Nama : Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc.
NIP : 199102022020121009
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIV-Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Kamis pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian skripsi.

Pihak Pertama,

Palembang, April 2025

Pihak Kedua,

Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM 062140512628

Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc
NIP 199102022020121009

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpun (0711) 353414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
Pembimbing I : Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	7 Maret 2025	Pengajuan Judul	
2.	11 Maret 2025	Acc Judul	
3.	14 Maret 2025	Pengajuan proposal	
4.	21 Maret 2025	Revisi Proposal	
5.	28 Maret 2025	Revisi Proposal	
6.	11 April 2025	Revisi Proposal	
7.	17 April 2025	Acc Proposal	
8.	16 Mei 2025	Revisi Bab 1, 2, 3	
9.	4 Juni 2025	Acc Bab 1, 2, 3	
10.	11 Juni 2025	Revisi Bab 4	
11.	23 Juni 2025	Revisi Bab 4 dan 5	
12.	30 Juni 2025	Acc Bab 4 & 5	
13.			

Palembang,
Ketua Jurusan

2025

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
Pembimbing II : Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3 Maret 2025	Konsultasi Judul	
2.	6 Maret 2025	Pengajuan Judul	
3.	10 Maret 2025	Acc Judul	
4.	13 Maret 2025	Pengajuan Proposal	
5.	20 Maret 2025	Revisi Proposal	
6.	10 April 2025	Revisi Proposal	
7.	17 April 2025	Revisi Proposal	
8.	21 April 2025	Acc. Proposal	
9.	23 Mei 2025	Revisi BAB 1 dan 2	
10.	11 Juni 2025	Acc BAB 2 dan 3	
11.	2 Juli 2025	Acc Bab 4. lamp 5	
12.	7 Juli 2025	Revisi BAB 4 dan 5.	
13.	8 Juli 2025	Acc - BAB IV Revisi BAB V	

Palembang,
Ketua Jurusan

2025

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar- Palembang 30139 Telpn (0711) 353414

Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Salsa Amanah Vintha Rihan
NIM : 062140512628
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
Pembimbing II : Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
14.	9-7-2025	ACC BAB V	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

Palembang,
Ketua Jurusan

2025

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197104121998022001



Lampiran 5: Hasil Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	-0.056632	-0.759219	-0.165866	-0.701700	-0.096044
Median	-0.051222	-0.755232	-0.137154	-0.741124	-0.077378
Maximum	1.944335	-0.433916	-0.073041	0.078602	-0.022414
Minimum	-0.397072	-1.943095	-0.421475	-1.422508	-0.297311
Std. Dev.	0.204542	0.181107	0.077767	0.312438	0.061030
Skewness	6.318376	-1.769360	-1.499391	0.311661	-1.369240
Kurtosis	59.86404	12.28802	4.931063	2.768142	4.412714
Jarque-Bera	24035.22	699.7620	90.11206	3.132870	67.25648
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.208788	0.000000
Sum	-9.627509	-129.0672	-28.19715	-119.2890	-16.32745
Sum Sq. Dev.	7.070541	5.543180	1.022073	16.49738	0.629476
Observations	170	170	170	170	170

Lampiran 6 : Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects
Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.332972	(33,132)	0.1303
Cross-section Chi-square	48.894442	33	0.0369

Lampiran 7 : Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.958545	4	0.0270

Lampiran 8 : Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.003165 (0.9551)	0.012895 (0.9096)	0.016060 (0.8992)

Lampiran 9 : Hasil Analisis Model Terpilih

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

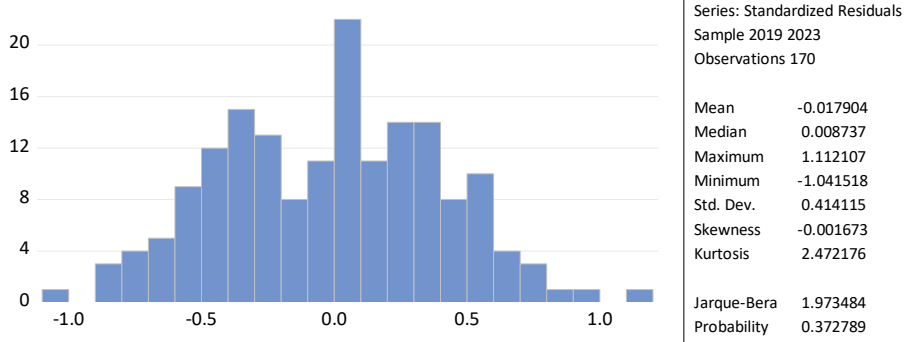
Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.304484	0.179840	-1.693079	0.0923
X1	0.084044	0.092100	0.912530	0.3628
X2	0.524461	0.473907	1.106676	0.2700
X3	-0.295028	0.120535	-2.447666	0.0154
X4	-1.995217	0.746843	-2.671534	0.0083
Root MSE	0.198316	R-squared	0.054395	
Mean dependent var	-0.056632	Adjusted R-squared	0.031472	
S.D. dependent var	0.204542	S.E. of regression	0.201298	
Akaike info criterion	-0.339092	Sum squared resid	6.685936	
Schwarz criterion	-0.246862	Log likelihood	33.82278	
Hannan-Quinn criter.	-0.301666	F-statistic	2.372882	
Durbin-Watson stat	2.161635	Prob(F-statistic)	0.054378	

Lampiran 10 : Hasil Uji Normalitas

24



Lampiran 11 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.032343	135.6893	NA
X1	0.008482	21.67323	1.160385
X2	0.224588	31.58692	5.664869
X3	0.014529	35.92717	5.915065
X4	0.557775	30.25064	8.664824

Lampiran 12 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.494845	Prob. F(4,165)	0.2061
Obs*R-squared	5.945131	Prob. Chi-Square(4)	0.2033
Scaled explained SS	8.614793	Prob. Chi-Square(4)	0.0715

Lampiran 13 : Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.475480	Prob. F(2,163)	0.6224
Obs*R-squared	0.986045	Prob. Chi-Square(2)	0.6108

Lampiran 14 : Hasil Uji Determinasi R²

Root MSE	0.198316	R-squared	0.054395
Mean dependent var	-0.056632	Adjusted R-squared	0.031472
S.D. dependent var	0.204542	S.E. of regression	0.201298
Akaike info criterion	-0.339092	Sum squared resid	6.685936
Schwarz criterion	-0.246862	Log likelihood	33.82278
Hannan-Quinn criter.	-0.301666	F-statistic	2.372882
Durbin-Watson stat	2.161635	Prob(F-statistic)	0.054378

Lampiran 15 : Hasil Uji F

Root MSE	0.198316	R-squared	0.054395
Mean dependent var	-0.056632	Adjusted R-squared	0.031472
S.D. dependent var	0.204542	S.E. of regression	0.201298
Akaike info criterion	-0.339092	Sum squared resid	6.685936
Schwarz criterion	-0.246862	Log likelihood	33.82278
Hannan-Quinn criter.	-0.301666	F-statistic	2.372882
Durbin-Watson stat	2.161635	Prob(F-statistic)	0.054378

Lampiran 16 : Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.304484	0.179840	-1.693079	0.0923
X1	0.084044	0.092100	0.912530	0.3628
X2	0.524461	0.473907	1.106676	0.2700
X3	-0.295028	0.120535	-2.447666	0.0154
X4	-1.995217	0.746843	-2.671534	0.0083



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon 0711-353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3733/PI.6.3.1/SP/2025

17 April 2025

Hal : Izin Pengambilan Data

Yth. Kepala

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Dengan hormat,

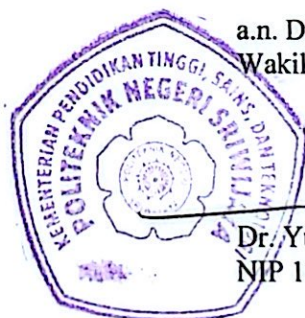
Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester VIII (delapan). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Tugas Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk mengumpulkan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/ Program Studi
1	Salsa Amanah Vintha Rihan	0621 4051 2628	8 AP C	Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur
Wakil Direktur I,

Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd.
NIP 197707052006041001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan

